

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: ...../POJK.05/2021

TENTANG

PENGAWASAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

| **Batang Tubuh** | | **Penjelasan** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang : | bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan; | I. UMUM  Ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) mengatur bahwa pengawasan eksternal terhadap Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dilakukan oleh Komite Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| Mengingat : | 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); | Penunjukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas independen atas BP Tapera sejalan pula dengan tugas pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU OJK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. |  |  |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863); | Sebagaimana amanat dalam UU Tapera bahwa pengawasan BP Tapera dilaksanakan oleh Komite Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan, maka Komite Tapera menjalankan fungsi sebagai perumus dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap BP Tapera untuk mendapatkan informasi secara dini terkait kepatuhan BP Tapera atas peraturan perundang-undangan mengenai Tapera. Adapun indikasi tersebut dapat diperoleh secara akurat apabila Otoritas Jasa Keuangan memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi BP Tapera yang dapat diperoleh melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.  Dengan adanya pengawasan baik dari Komite Tapera maupun Otoritas Jasa Keuangan terhadap BP Tapera, diharapkan agar pengelolaan program dana Tapera yang transparan, berkelanjutan, dan mampu melindungi kepentingan masyarakat, dapat terwujud sesuai dengan amanat UU Tapera. |  |  |
| MEMUTUSKAN: | |  |  |  |
| Menetapkan : | PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur hal-hal pokok mengenai pengawasan BP Tapera seperti ruang lingkup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas BP Tapera, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta BP Tapera menyusun dan menyampaikan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta pemberian rekomendasi kepada BP Tapera termasuk Komite Tapera. Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap BP Tapera dapat berjalan secara efektif dan efisien. |  |  |
| BAB I | | II. PASAL DEMI PASAL |  |  |
| KETENTUAN UMUM | |  |  |  |
| Pasal 1 | | Pasal 1 |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: | | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. | |  |  |  |
| 1. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera. | |  |  |  |
| 1. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan simpanan beserta hasil pemupukannya. | |  |  |  |
| 1. Pengawasan adalah proses kegiatan penilaian terhadap BP Tapera dan pihak terkait dengan tujuan agar BP Tapera melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. | |  |  |  |
| 1. Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Komite Tapera adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera. | |  |  |  |
| 1. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam BP Tapera untuk menentukan keputusan dan pengelolaan BP Tapera dengan menggunakan prinsip antara lain transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. | |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| BAB II | |  |  |  |
| RUANG LINGKUP PENGAWASAN BP TAPERA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN | |  |  |  |
| Bagian Kesatu  Umum | |  |  |  |
| Pasal 2 | | Pasal 2 |  |  |
| 1. Pengawasan terhadap BP Tapera dilaksanakan oleh Komite Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan. | | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap BP Tapera sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Tapera. | | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan di bidang Tapera antara lain:   1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat; 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan Dana Tapera dan pengelolaan investasi Dana Tapera; dan 4. Peraturan BP Tapera yang dibentuk dalam rangka operasional BP Tapera. |  |  |
| 1. Ruang lingkup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: | | Ayat (2) |  |  |
| 1. aktivitas penyelenggaraan Tapera yang mencakup pelaksanaan tugas dan kewenangan BP Tapera dalam rangka pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan dana Tapera berdasarkan peraturan perundangan; | | Huruf a  Yang dimaksud dengan:   1. pengerahan adalah pengumpulan dana dari peserta Tapera yang selanjutnya disimpan oleh bank kustodian yang ditunjuk oleh BP Tapera; 2. pemupukan adalah upaya peningkatan nilai Dana Tapera yang dilakukan melalui kontrak investasi kolektif antara bank kustodian dan manajer investasi yang ditunjuk oleh BP Tapera; dan 3. pemanfaatan adalah penyaluran Dana Tapera untuk pembiayaan perumahan melalui bank atau perusahaan pembiayaan yang ditunjuk oleh BP Tapera. |  |  |
| 1. pengelolaan aset BP Tapera; dan | | Huruf b  Yang dimaksud dengan aset BP Tapera adalah aset yang dimiliki oleh BP Tapera yang dipergunakan untuk kegiatan operasional BP Tapera maupun kegiatan investasi BP Tapera. |  |  |
| 1. penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan manajemen risiko pada BP Tapera. | | Huruf c  Termasuk dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan manajemen risiko adalah tersedianya sistem pengendalian internal yang menyeluruh pada BP Tapera. |  |  |
| 1. Penerapaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan manajemen risiko pada BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Tapera dan pedoman internal BP Tapera. | | Ayat (3)  Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan di bidang Tapera antara lain:   1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat; 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan Dana Tapera; dan 4. Peraturan BP Tapera yang dibentuk dalam rangka operasional BP Tapera.   Yang dimaksud dengan pedoman internal BP Tapera, misalnya pedoman tata kelola perusahaan yang baik dan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh BP Tapera. |  |  |
| Pasal 3 | | Pasal 3 |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui Pengawasan langsung maupun Pengawasan tidak langsung. | | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan atas BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| Bagian Kedua  Pelaksanaan Pengawasan Langsung | |  |  |  |
| Pasal 4 | | Pasal 4 |  |  |
| 1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pengawasan langsung terhadap BP Tapera melalui pemeriksaan. | | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai BP Tapera yang dilakukan di kantor BP Tapera dan/atau di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BP Tapera, termasuk dapat dilakukan dengan media *video conference*. |  |  |
| 1. Dalam melakukan Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait. | | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak yang ditunjuk oleh BP Tapera dalam rangka pengelolaan Dana Tapera baik melalui pengerahan Dana Tapera, pemupukan Dana Tapera, dan pemanfaatan Dana Tapera berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, beserta peraturan pelaksanaannya. |  |  |
| 1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: | | Ayat (3) |  |  |
| 1. memperoleh gambaran mengenai kondisi BP Tapera; dan/atau | | Huruf a  Cukup jelas |  |  |
| 1. menilai bahwa BP Tapera telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Tapera dan pedoman internal BP Tapera. | | Huruf b  Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan di bidang Tapera antara lain:   1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat; 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan Dana Tapera dan investasi Dana Tapera; dan 4. Peraturan BP Tapera yang dibentuk dalam rangka operasional BP Tapera.   Yang dimaksud dengan pedoman internal BP Tapera, misalnya pedoman tata kelola perusahaan yang baik dan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh BP Tapera. |  |  |
| Pasal 5 | | Pasal 5 |  |  |
| 1. Pemeriksaan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap BP Tapera dapat mencakup seluruh aspek atau sebagian aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3). | | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihak lain sebagai pemeriksa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemeriksaan, yang penunjukannya dilakukan berdasarkan surat perintah kerja. | | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain akuntan publik, aktuaris, penilai independen, konsultan teknologi informasi, dan/atau pihak lainnya yang dapat ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemeriksaan terhadap BP Tapera. |  |  |
| 1. Laporan hasil pemeriksaan BP Tapera oleh pihak lain yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia. | | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Laporan hasil pemeriksaan BP Tapera oleh pihak lain yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dimanfaatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan atau diserahkan kepada pihak lain selain Otoritas Jasa Keuangan. | | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 6 | | Pasal 6 |  |  |
| Pemeriksaan terhadap BP Tapera dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan pemeriksaan. | | Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 7 | | Pasal 7 |  |  |
| 1. Pengawasan langsung dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pengawasan BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| Pasal 8 | | Pasal 8 |  |  |
| 1. BP Tapera dan pihak terkait yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) wajib: | |  |  |  |
| 1. memenuhi permintaan pemeriksa untuk memberikan atau meminjamkan buku, berkas, catatan, disposisi, memorandum, dokumen, data elektronik, termasuk salinan-salinannya; | | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| 1. memberikan keterangan dan penjelasan kepada pemeriksa berdasarkan fakta dan kondisi sebenarnya yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa baik lisan maupun tertulis; | | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| 1. memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk meneliti keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa; dan/atau | | Huruf c  Yang dimaksud keberadaan dan penggunaan sarana fisik adalah termasuk tempat atau ruangan kerja BP Tapera. |  |  |
| 1. menghadirkan pihak ketiga termasuk auditor independen atas permintaan pemeriksa untuk memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan kepada pemeriksa terkait dengan Pengawasan langsung. | | Huruf d  Cukup jelas. |  |  |
| 1. memenuhi permintaan lainnya dari pemeriksa untuk mendukung proses pemeriksaan terhadap BP Tapera dan pihak terkait. | | Huruf e  Cukup jelas. |  |  |
| 1. BP Tapera dan pihak terkait yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dilarang menghambat proses Pengawasan langsung. | | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan menghambat proses Pengawasan langsung antara lain apabila BP Tapera tidak segera memperlihatkan dokumen atau hal lain yang diperlukan dalam Pengawasan langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, atau meminjamkan buku, memberikan catatan, dokumen, atau keterangan yang tidak benar. |  |  |
| Pasal 9 | | Pasal 9 |  |  |
| 1. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat perintah pemeriksaan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat perintah pemeriksaan kepada BP Tapera dan pihak terkait yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). | | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Sebelum dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada BP Tapera dan pihak tekait yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). | | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Surat pemberitahuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi sebagai berikut: | | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. nomor dan tanggal surat perintah pemeriksaan; | |  |  |  |
| 1. susunan tim pemeriksa; | |  |  |  |
| 1. ruang lingkup pemeriksaan; | |  |  |  |
| 1. tujuan pemeriksaan; | |  |  |  |
| 1. periode pemeriksaan; | |  |  |  |
| 1. dokumen awal yang diperlukan untuk pemeriksaan; dan | |  |  |  |
| 1. batas waktu penyampaian dokumen awal kepada pemeriksa. | |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan tanpa didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan apabila: | | Ayat (5)  Sumber informasi yang menjadi pertimbangan tidak disampaikannya terlebih dahulu surat pemberitahuan pemeriksaan, termasuk informasi yang diperoleh dari media massa. |  |  |
| 1. terdapat dugaan adanya tindakan untuk mempersulit atau menghambat proses pemeriksaan; | |  |  |  |
| 1. terdapat dugaan adanya tindakan untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya; atau | |  |  |  |
| 1. terdapat dugaan adanya tindakan menyembunyikan, menghilangkan data, keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan. | |  |  |  |
| Pasal 10 | | Pasal 10 |  |  |
| 1. Dalam proses pemeriksaan, pemeriksa melakukan konfirmasi kepada BP Tapera dan/atau pihak terkait atas temuan pada pemeriksaan. | | Ayat (1)  Pemeriksa melakukan konfirmasi kepada BP Tapera dan/atau pihak terkait untuk meminta penjelasan tambahan atas temuan pemeriksa atau meminta bukti atau fakta tambahan atas temuan dimaksud. |  |  |
| 1. Sebelum pemeriksaan berakhir, pemeriksa melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan BP Tapera dan/atau pihak terkait atas temuan pada pemeriksaan. | | Ayat (2)  Pembahasan terlebih dahulu atau *pra-exit meeting* untuk memastikan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa telah sesuai dengan bukti atau fakta dan dapat diterima oleh BP Tapera maupun pihak terkait. |  |  |
| 1. Pada saat pemeriksaan berakhir, pemeriksa melakukan pertemuan dengan komisioner BP Tapera dan/atau pimpinan dari pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atas hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan. | | Ayat (3)  Pemeriksa melakukan pertemuan atau *exit meeting* untuk menyampaikan hasil Pemeriksaan beserta bukti atau fakta, serta rekomendasi atau tindak lanjut setelah Pemeriksaan kepada komisioner BP Tapera.  Dalam pertemuan atau *exit meeting* tidak ada lagi perbedaan pendapat antara pemeriksa dengan BP Tapera.  Yang dimaksud dengan “pimpinan” dari pihak terkait adalah direksi atau yang setara bagi kantor pusat atau pimpinan cabang bagi kantor cabang. |  |  |
| 1. Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang berisi hasil pemeriksaan dan rekomendasi atau tindak lanjut yang ditandatangani oleh pemeriksa, komisioner BP Tapera, dan/atau pimpinan dari pihak terkait. | | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 1. Dalam hal komisioner BP Tapera dan/atau pimpinan dari pihak terkait menolak untuk menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemeriksa menetapkan berita acara tanpa ditandatangani oleh komisioner BP Tapera dan/atau pimpinan dari pihak terkait. | |  |  |  |
| 1. Periode pemeriksaan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan maupun kompleksitas pemeriksaan BP Tapera. | | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 11 | | Pasal 11 |  |  |
| 1. Setelah proses pemeriksaan berakhir, pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan. | | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BP Tapera. | | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia. | | Ayat (3)  Laporan hasil pemeriksaan dimaksudkan sebagai alat pembinaan untuk peningkatan kinerja BP Tapera. Oleh karena itu, BP Tapera tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan data dan/atau informasi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan. |  |  |
| 1. Penggunaan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak di luar BP Tapera wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali diatur lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. | | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 12 | | Pasal 12 |  |  |
| 1. BP Tapera wajib melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). | |  |  |  |
| 1. BP Tapera wajib melaporkan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. | |  |  |  |
| 1. Kewajiban melaporkan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir apabila Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa BP Tapera telah melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan. | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| BAB III | |  |  |  |
| TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK | |  |  |  |
| Pasal 13 | | Pasal 13 |  |  |
| 1. BP Tapera wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. | | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: | | Ayat (2) |  |  |
| 1. keterbukaan (*transparency*); | | Huruf a  Yang dimaksud dengan keterbukaan (*transparency*) adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai BP Tapera, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Tapera serta standar, prinsip, dan praktik pengelolaan Dana Tapera yang sehat. |  |  |
| 1. akuntabilitas (*accountability*); | | Huruf b  Yang dimaksud dengan akuntabilitas (*accountability*) adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BP Tapera sehingga kinerja BP Tapera dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien. |  |  |
| 1. pertanggungjawaban (*responsibility*); | | Huruf c  Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban (*responsibility*) adalah kesesuaian pengelolaan BP Tapera dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Tapera dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik pengelolaan aset BP Tapera yang sehat. |  |  |
| 1. kemandirian (*independency*); dan | | Huruf d  Yang dimaksud dengan kemandirian (*independency*) adalah keadaan BP Tapera yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Tapera dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik pengelolaan aset BP Tapera yang sehat. |  |  |
| 1. kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). | | Huruf e  Yang dimaksud dengan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) adalah kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik pengelolaan aset BP Tapera yang sehat. |  |  |
| Pasal 14 | | Pasal 14 |  |  |
| 1. Penerapan prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling sedikit diwujudkan dalam: | | Cukup jelas. |  |  |
| 1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komisioner BP Tapera dan Komite Tapera; | |  |  |  |
| 1. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komisi dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal; | |  |  |  |
| 1. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal; | |  |  |  |
| 1. penerapan manajemen risiko; | |  |  |  |
| 1. rencana strategis; dan | |  |  |  |
| 1. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. | |  |  |  |
| 1. Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib dituangkan dalam suatu pedoman. | |  |  |  |
| 1. Dalam rangka menerapkan prinsip Tata Kelola yang baik, Komisioner BP Tapera paling sedikit wajib membentuk: | |  |  |  |
| 1. satuan kerja audit internal; | |  |  |  |
| 1. satuan kerja manajemen risiko dan komisi manajemen risiko; | |  |  |  |
| 1. komisi investasi; dan | |  |  |  |
| 1. satuan kerja kepatuhan. | |  |  |  |
| 1. Dalam rangka menerapkan prinsip Tata Kelola yang baik, BP Tapera wajib membentuk komisi atau fungsi penunjang Komite Tapera paling sedikit: | |  |  |  |
| 1. komisi atau fungsi audit; | |  |  |  |
| 1. komisi atau fungsi pemantau risiko; dan | |  |  |  |
| 1. komisi atau fungsi remunerasi dan nominasi. | |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap sistem dan prosedur pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BP Tapera untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | |  |  |  |
| 1. BP Tapera wajib menindaklanjuti permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik. | |  |  |  |
| Pasal 15 | | Pasal 15 |  |  |
| 1. BP Tapera wajib melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi akhir tahun. | | ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penilaian sendiri (*self assesment*) atau dilakukan oleh pihak independen. | | ayat (2)  Yang dimaksud dengan “pihak independen” adalah pihak di luar BP Tapera yang independen dan memberikan jasa kepada BP Tapera dalam rangka penilaian sendiri atas aspek penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, antara lain konsultan manajemen. |  |  |
| Pasal 16 | | Pasal 16  Cukup jelas. |  |  |
| 1. BP Tapera wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada setiap akhir tahun buku. | |  |  |  |
| 1. Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 2. transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); 3. penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan 4. rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. | |  |  |  |
| 1. BP Tapera wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya. | |  |  |  |
| 1. Apabila tanggal 28 Februari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. | |  |  |  |
| BAB IV | |  |  |  |
| MANAJEMEN RISIKO | |  |  |  |
| Pasal 17 | | Pasal 17 |  |  |
| 1. BP Tapera wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. | | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penerapan manajemen risiko secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: | |  |  |  |
| 1. pengawasan aktif komisioner BP Tapera dan Komite Tapera; | |  |  |  |
| 1. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko; | |  |  |  |
| 1. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan | |  |  |  |
| 1. sistem pengendalian internal yang menyeluruh. | |  |  |  |
| 1. Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP Tapera wajib memiliki pedoman penerapan manajemen risiko. | |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap pedoman penerapan manajemen risiko BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (3). | |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BP Tapera untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman penerapan manajemen risiko. | |  |  |  |
| 1. BP Tapera wajib menindaklanjuti permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman penerapan manajemen risiko. | |  |  |  |
| Pasal 18 | | Pasal 18 |  |  |
| Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mencakup paling sedikit jenis risiko: | |  |  |  |
| 1. risiko kredit; | | Huruf a  Yang dimaksud dengan “risiko kredit” adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BP Tapera. |  |  |
| 1. risiko pasar; | | Huruf b  Yang dimaksud dengan “risiko pasar” adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. |  |  |
| 1. risiko likuiditas; | | Huruf c  Yang dimaksud dengan “risiko likuiditas” adalah risiko akibat ketidakmampuan BP Tapera untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan BP Tapera. |  |  |
| 1. risiko operasional; | | Huruf d  Yang dimaksud dengan “risiko operasional” adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional BP Tapera. |  |  |
| 1. risiko hukum; | | Huruf e  Yang dimaksud dengan “risiko hukum” adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. |  |  |
| 1. risiko reputasi; | | Huruf f  Yang dimaksud dengan “risiko reputasi” adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap BP Tapera. |  |  |
| 1. risiko strategis; | | Huruf g  Yang dimaksud dengan “risiko strategis” adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. |  |  |
| 1. risiko kepatuhan; | | Huruf h  Yang dimaksud dengan “risiko kepatuhan” adalah risiko akibat BP Tapera tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. |  |  |
| 1. risiko imbal hasil; dan | | Huruf i  Yang dimaksud dengan “risiko imbal hasil” adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan BP Tapera kepada pihak pemberi pendanaan karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima BP Tapera dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku pihak pemberi pendanaan kepada BP Tapera. |  |  |
| 1. risiko investasi. | | Huruf j  Yang dimaksud dengan “risiko investasi” adalah risiko akibat BP Tapera ikut menanggung kerugian usaha pihak yang didanai dalam pendanaan berbasis bagi hasil. |  |  |
| Pasal 19 | | Pasal 19 |  |  |
| 1. Dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), BP Tapera wajib melakukan penilaian tingkat risiko. | | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi akhir tahun. | |  |  |  |
| 1. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BP Tapera untuk melakukan penilaian tingkat risiko sewaktu-waktu. | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| Pasal 20 | | Pasal 20  Cukup jelas. |  |  |
| 1. BP Tapera wajib menyampaikan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan: 2. untuk penilaian tingkat risiko posisi akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya; dan 3. untuk penilaian tingkat risiko sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | |  |  |  |
| 1. Apabila tanggal 28 Februari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, maka batas akhir penyampaian hasil penilaian tingkat risiko adalah hari kerja pertama berikutnya. | |  |  |  |
| BAB V | |  |  |  |
| PELAPORAN | |  |  |  |
| Pasal 21 | | Pasal 21 |  |  |
| 1. BP Tapera wajib menyusun laporan sebagai berikut: | | Cukup jelas. |  |  |
| 1. laporan bulanan BP Tapera; | |  |  |  |
| 1. laporan internal audit BP Tapera; | |  |  |  |
| 1. laporan keuangan tahunan BP Tapera; dan | |  |  |  |
| 1. laporan pengelolaan program Tapera. | |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | |  |  |  |
| 1. Laporan internal audit BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dan disajikan berdasarkan pedoman internal yang ditetapkan oleh BP Tapera. | |  |  |  |
| 1. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan disajikan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. | |  |  |  |
| 1. Laporan pengelolaan program Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dan disajikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. | |  |  |  |
| Pasal 22 | | Pasal 22 |  |  |
| 1. BP Tapera wajib menyampaikan: | | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; | |  |  |  |
| 1. laporan internal audit BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b secara triwulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya periode yang dilaporkan; dan | |  |  |  |
| 1. laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan pengelolaan program Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya; | |  |  |  |
| kepada Otoritas Jasa Keuangan. | |  |  |  |
| 1. Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas akhir dimaksud. | | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan batas waktu penyampaian laporan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kondisi tertentu. | | Ayat (3)  Yang dimaksud dengan kondisi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada kondisi *force majeur*. |  |  |
| Pasal 23 | | Pasal 23 |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BP Tapera untuk menyampaikan laporan, informasi dan/atau dokumen tertentu dalam rangka Pengawasan atas BP Tapera. | | Cukup jelas. |  |  |
|  | |  |  |  |
| BAB VI | |  |  |  |
| SANKSI DAN REKOMENDASI | |  |  |  |
| Pasal 24 | | Pasal 24 |  |  |
| 1. Dalam hal BP Tapera melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), ayat (3), Pasal 17 ayat (1), ayat (3), ayat (6), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. | | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. | |  |  |  |
| 1. Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku peringatan tertulis ketiga BP Tapera tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan berlakunya jangka waktu tambahan paling lama 6 (enam) bulan. | |  |  |  |
| 1. Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka waktu tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), BP Tapera tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memberikan rekomendasi kepada Komite Tapera. | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| BAB VII | |  |  |  |
| KETENTUAN LAIN-LAIN | |  |  |  |
| Pasal 25 | | Pasal 25 |  |  |
| Pengawasan atas bank kustodian, manajer investasi, bank, dan/atau perusahaan pembiayaan yang ditunjuk oleh BP Tapera dalam rangka pengelolaan Dana Tapera, mengacu pada mekanisme pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan sektoral masing-masing. | | Yang dimaksud peraturan perundang-undangan sektoral masing-masing antara lain peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pasar modal, dan/atau industri keuangan nonbank. |  |  |
|  | |  |  |  |
| BAB VIII | |  |  |  |
| KETENTUAN PENUTUP | |  |  |  |
| Pasal 26 | | Pasal 26 |  |  |
| Kewajiban penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan oleh BP Tapera sejak periode laporan bulan Januari 2023. | | Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 27 | | Pasal 27 |  |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | | Cukup jelas. |  |  |
|  | |  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. | |  |  |  |
|  | |  |  |  |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR